

Pendekatan Konstruktivis dalam Kajian Diplomasi Publik Indonesia

Iva Rachmawati

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jalan SWK 104, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, Indonesia
iva.rachma@gmail.com
Diserahkan: 13 September 2016, diterima: 13 Desember 2016

Abstract

Rationalist approach remains dominant in the research of Indonesian public diplomacy. Therefore, public diplomacy is always used as a tool to gain the national interests through a particular image. In such framing, all activities in public diplomacy are intended for the state's positive image. Besides, Rationalist still puts state as the main actor in public diplomacy. Domestic dimension did not have the same position as the state in interpreting international phenomena. Whereas, each actor has the same access to information and communication nowadays. Rationalist has given dialogue as an important contribution to public diplomacy strategy. Dialogue is one of the communication forms which have a capability to build trust between actors. Several problems in limiting the development of public diplomacy concept become a reference for proposing Constructivist as an alternative approach. This approach will help understanding public diplomacy more by putting the consciousness of the difference of national identity and relationship building as the main purposes. Several empirical studies showed that national identity preservation had already held by not only a state but also domestic dimension. This approach will give domestic dimension a wider room in public diplomacy as well as the state in interpreting international phenomenon.

Keywords: Public Diplomacy, Constructivist View, Consciousness and Relationship Building, Domestic Dimension.

Abstrak

Dalam kajian-kajian diplomasi publik Indonesia, pendekatan rasionalis masih merupakan pendekatan yang dominan. Akibatnya, diplomasi publik selalu diletakkan sebagai alat untuk meraih kepentingan nasional melalui citra tertentu. Pembingkai diplomasi publik semacam ini mengarahkan sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam diplomasi publik semata-mata demi meraih citra positif negara tersebut. Di samping itu, pendekatan ini juga masih menempatkan negara sebagai aktor utama dalam diplomasi publik. Dimensi domestik belum mendapat tempat sebagai aktor yang sejajar dalam menginterpretasi fenomena antar negara. Sementara itu pada kenyataannya, setiap aktor memiliki akses yang sama dalam informasi dan komunikasi. Rasionalis memang telah memberi kontribusi penting dalam strategi dalam diplomasi publik, yaitu dialog, dimana komunikasi dalam bentuk dialog mampu menumbuhkan kepercayaan antar aktor. Beberapa hal yang dirasa membatasi perkembangan konsepsi diplomasi publik menjadi rujukan melalui artikel ini untuk mengusulkan pendekatan Konstruktivis dalam memahami diplomasi publik. Pendekatan tersebut meletakkan kesadaran atas perbedaan identitas nasional dan *relationship building* sebagai tujuan utamanya. Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa upaya memelihara identitas nasional telah dilakukan oleh tidak saja negara tetapi juga dimensi domestik. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang bagi dimensi domestik sebagai aktor di samping negara dalam diplomasi publik.

Kata kunci: Konstruktivisme, Diplomasi Publik, Kesadaran dan Relationship Building, Dimensi Domestik

PENDAHULUAN

Studi mengenai diplomasi publik Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Selain studi diplomasi publik merupakan studi yang relatif baru, riset Rasmussen menunjukkan bahwa mereka yang menyelenggarakan diplomasi publik secara lebih serius adalah negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang relatif lebih mapan (Rasmussen, 2011).

Masih minimnya riset mengenai diplomasi publik juga didorong sikap skeptik akademisi yang menempatkan diplomasi sebagai sebuah keahlian praktis semata yang sifatnya sangat tergantung situasi yang melingkupinya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pendapat Raymond Cohen dalam artikelnya *'Putting Diplomatic Studies on the Map'* yang menyatakan diplomasi sebagai

sebagai ruang mesin hubungan internasional atau sebagai soko guru oleh Martin Wight dalam bukunya *Power Politics* (Nsson, 2013: 436). Sayangnya secara teoritis perkembangannya relatif lambat dibandingkan dengan obyek kajian hubungan internasional yang lain (Nsson, 2013: 436).

Di Indonesia sendiri, secara institusional Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik baru dibentuk pada tahun 2002, satu tahun setelah peristiwa 9/11 terjadi. Isu keamanan merupakan salah satu isu yang cukup kuat pada waktu itu mengingat Amerika begitu reaktif terhadap isu terorisme yang menerpanya di tahun 2001. Melalui GWOT (*Global War on Terror*) yang dicanangkan George Bush kala itu, diplomasi publik Amerika diarahkan pada upaya-upaya pemberantasan terorisme dan upaya untuk memberikan informasi lebih baik mengenai Amerika pada dunia terutama negara-negara yang dikhawatirkan memiliki potensi atas tumbuhnya terorisme, termasuk Indonesia yang diletakkan pada lingkaran kedua setelah negara-negara Timur Tengah (Hoffman, 2002; Singer, 2006).

Pengaruh isu keamanan nampak kemudian pada citra negara yang dilekatkan kepada diplomasi publik Indonesia dimana Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada waktu itu, menyematkan label moderat, progresif dan demokratis kepadanya (Wirajuda, 2007). Semenjak dicetuskannya citra Indonesia sebagai negara yang demokratis, moderat dan progresif tersebut, kajian mengenai diplomasi publik Indonesia berkuat pada tujuan 'pencitraan'. Tulisan ini hendak melihat bagaimana diplomasi publik Indonesia dikaji oleh beberapa akademisi untuk menawarkan pendekatan lain yaitu Konstruktivis dalam melihat konsep diplomasi publik. Melalui pendekatan konstruktivis, diplomasi publik tidak lagi dilihat sebagai semata-mata upaya pemerintah dengan melibatkan *non-state actors* untuk mempengaruhi negara lain melalui citra tertentu melainkan lebih kepada sejumlah upaya yang dijalin oleh agen dalam upaya untuk mempengaruhi relasi antar negara.

PEMBAHASAN

KAJIAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

Dalam kajian diplomasi publik Indonesia dapat ditemukan 3 isu, pertama isu mengenai tujuan diplomasi publik, kedua adalah isu mengenai aktor domestik dalam diplomasi publik dan yang ketiga adalah strategi dalam diplomasi publik. Tujuan diplomasi publik dalam kajian diplomasi publik Indonesia banyak didominasi oleh citra sebagai jembatan bagi kepentingan nasional. Pada isu aktor dalam diplomasi publik, kajian-kajian diplomasi publik Indonesia masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Sementara dalam isu strategi, dialog telah mulai banyak dipakai guna membangun kepercayaan antar negara dan publik di luar negara.

Isu pertama yaitu citra atau *image*. Citra menjadi kajian utama dalam diplomasi publik Indonesia (Ma'mun, 2009; Effendy, 2013; Gabriella, 2013; Novika Sari, 2013) dengan meletakkannya sebagai tujuan dari keseluruhan rangkaian kegiatan diplomasi publik. Riset-riset tersebut mengasumsikan bahwa citra positif mengenai sebuah negara dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri. Upaya yang dilakukan dalam rangka menjembatani persepsi di luar negara dengan apa yang terjadi di dalam negara (Hadi, 2009) ini diyakini dapat menjadi alat bagi Indonesia untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Citra sesungguhnya adalah sebuah refleksi dari diri, jadi jika kondisi internal suatu negara itu buruk maka tidak dapat dihindari lagi pantulannya akan buruk pula. Mengacu pada pendapat Leonard, citra merupakan premis dasar diplomasi publik dimana citra atau reputasi merupakan 'public goods' yang memungkinkan seseorang melakukan atau tidak melakukan transaksi (Leonard, 2002). Citra tersebut menjadi sebuah *brand image* yang dengan sengaja diletakkan oleh negara untuk memberikan gambaran publik dan pemerintah di luar negara mengenai Indonesia.

Kepentingan ekonomi dan keamanan menjadi agenda utama dalam pembentukan citra negara. Implementasi diplomasi publik dalam sejumlah

Tabel 1. Riset Diplomasi Publik Indonesia dalam Rasionalis dan Konstruktivis Berdasarkan Tujuan, Aktor dan Strategi

NO	RISET	TUJUAN	AKTOR	STRATEGI
1.	Rasionalis	<i>Image building</i> untuk kepentingan nasional	Aktor negara dan aktor non negara serta dimensi domestik yang bersifat subordinan	Diseminasi informasi kebijakan luar negeri kepada publik dan pelibatan publik domestik, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam untuk mendukung kebijakan luar negeri negara
2.	Konstruktivis	<i>Relationship building</i>	Aktor negara dan aktor non negara serta dimensi domestik yang bersifat independen	Proyek kesadaran warga negara dan relasi antar warga

kegiatan dirancang untuk membangun kepercayaan dan kesepahaman (Effendy, 2013). Sejumlah kegiatan juga dirancang untuk membangun dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Ma'mun bahkan membuat model diplomasi publik dalam Model Pelayanan Informasi Pemberdayaan Publik (Ma'mun, 2009: 310) demi tujuan ini.

Isu kedua adalah aktor dalam diplomasi publik. Meskipun pada beberapa riset, aktor domestik non negara (selanjutnya akan disebut sebagai aktor domestik) telah mendapat tempat di dalam aktifitas diplomasi publik, namun keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut berada di bawah kendali negara. Negaralah yang menjadi satu-satunya aktor dalam menginterpretasi fenomena yang terjadi antar negara dan negaralah yang menjadi satu-satunya pengambil keputusan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan serta informasi apa saja yang diberikan kepada publik. Situasi ini mendorong Ma'mun mengusulkan Model Diplomasi Publik dengan Pelayanan Informasi Terintegrasi Berstruktur dalam disertasinya. Ia meletakkan diplomasi publik sebagai institusi *public relation* pemerintah guna memberikan informasi sebenar-benarnya mengenai isu antar negara yang sedang terjadi. Institusi *public relations* semacam ini harus diletakkan dari tingkat yang paling bawah hingga pusat. Sementara pada riset Effendi, negara menjadi aktor utama dalam mendorong dan memedomani aktor domestik dalam kegiatan yang diinisiasinya baik dalam bidang ekonomi dan budaya (Effendy, 2013).

Sedangkan isu ketiga yaitu strategi dalam diplomasi publik, kajian-kajian ini telah beranjak dari strategi monolog menjadi dialog. Upaya ini dipercaya dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dari pemerintah dan publik negara lain terhadap Indonesia. Bersamaan dengan diplomasi budaya (Clarisa Gabriell, 2013; Novika Sari, 2013), upaya dialogis untuk memperkenalkan nilai ke-Indonesiaan dilakukan. Program pertukaran pelajar melalui kegiatan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) juga menjadi satu kajian yang mengangkat mengenai strategi diplomasi publik dalam mengenalkan nilai-nilai ke-Indonesiaan untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan (Issundari dan Rachmawati, 2015).

Tabel 1 menunjukkan beberapa riset mengenai diplomasi publik Indonesia yang lebih banyak berkuat pada *image building* sebagai tujuan, negara sebagai aktor dominan dan diseminasi informasi baik monolog maupun dialog sebagai strategi diplomasi publik.

DOMINASI RASIONALIS DALAM KAJIAN DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

Merujuk pada tabel 1, kotak riset pertama, pengaruh rasionalis sangat terasa dengan ditempatkannya kepentingan nasional sebagai tujuan dan negara sebagai aktor utama dalam diplomasi publik. Rasionalis merupakan tradisi yang melahirkan konsep diplomasi. Ia percaya pada cara-cara yang bersifat akomodatif dan kompromistis melalui tatanan

internasional. Mereka memfokuskan diri pada bagaimana *sistem of state* menjadi *society of state* dimana tujuan bersama, kepentingan dan aturan menjadi isu yang penting dalam pembangunan masyarakat ini (Devlen et. all, 2005). Kaum rasionalis bahkan percaya bahwa tatanan internasional dapat terbentuk meskipun masing-masing negara tidak memiliki kultur politik yang sama karena setiap negara dan individu sesungguhnya memiliki nilai politis yang sama (Linklater, 1996: 98). Studi mengenai diplomasi berada dalam kerangka untuk menjembatani tercapainya tujuan-tujuan tersebut di antara negara-negara yang diasumsikan semua negara memiliki tujuan rasional yang sama dalam hubungan antar negara.

Dipersepsikannya diplomasi publik sebagai sebuah upaya negara untuk mendapatkan kepentingan nasional membuat seringkali disamakan dengan propaganda. Pada masa perang dingin diplomasi publik seringkali dipertukarkan dengan propaganda karena sama-sama dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Beberapa akademisi dan praktisi, bahkan pada masa sesudahnyapun, masih menganggap perbedaan diplomasi publik dan propaganda bukanlah hal yang terlalu penting (Berridge, 2010). Diplomasi publik dipandang sebagai sebuah terminologi yang lebih halus dibandingkan dengan manipulasi (atau propaganda) (Brown, 2012).

Tujuan diplomasi publik yang diabdikan pada kepentingan nasional ditegaskan oleh Edward Murrow (Snow, 2008) dan Edmund Gullion (Public Diplomacy Association, 2012) bahwa, "*Public diplomacy... deals with the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies.*". Pengaruh merupakan kunci dari diplomasi publik untuk mendapatkan kepentingan yang sesungguhnya yaitu kerjasama ekonomi dan keamanan. Sejalan dengan pemahaman kaum rasionalis bahwa setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu tatanan internasional yang hanya akan dapat dicapai melalui kerjasama dan dialog, maka diplomasi merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Paul Sharp menyatakan, bahwa diplomasi publik

merupakan proses yang dilakukan untuk mengejar dan memperbesar kepentingan dan nilai-nilai tertentu dari negara yang diwakili (Ham, 2010:115). Sedangkan melalui Transformational diplomacy, Condoleeza Rice dengan tegas menyatakan bahwa, *Public diplomacy is defined in different ways, but broadly it is a term used to describe a government's efforts to conduct foreign policy and promote national interests through direct outreach and communication with the population of a foreign country* (Nakamura dan Weed, 2009). Citra kemudian menjadi jembatan bagi publik dan negara lain untuk memahami dan menerima sebuah negara dan menjadi jembatan bagi tercapainya kepentingan nasional.

Aktor dalam diplomasi publik merupakan perdebatan tersendiri dimana isu dimensi domestik (kelompok-kelompok publik domestik yang berada di dalam negara) merupakan perdebatan terakhir dalam diplomasi publik (Huijgh, 2012). Rasionalis memberikan ruang yang cukup besar bagi aktor non negara dalam diplomasi publik. Meski demikian, ia masih menempatkan negara sebagai pemeran utama dalam diplomasi publik. Negara baginya sudah seharusnya menjadi koordinator dari seluruh kegiatan diplomasi publik. Sementara aktor domestik hanyalah merupakan subyek pasif yang hubungannya bersifat subordinan (tidak menginterpretasi fenomena isu antar negara tetapi berada dalam program diplomasi publik negara). Istilah *government driven* dipergunakan Melissen untuk menggambarkan seperti apapun kekuatan pengaruh dari aktor non negara, negara harus mampu menjadi kontrol utama dari setiap diplomasi yang dilakukan (Melissen, 2011). Bagi Berridge, negara masih merupakan pemain utama dan koordinator dalam pelaksanaan diplomasi publik. Alasannya adalah Kementerian Luar Negeri masih menjadi tempat dimana publikasi cetak dan non cetak mengenai informasi kebijakan dan lain-lain dilakukan (Berridge, 2010). Negara, melalui Kementerian Luar Negerinya, merupakan pencetus dan penggerak utama diplomasi publik (Rasmussen, 2009). Meski telah memberikan tempat bagi aktor non negara dalam diplomasi publik, namun beberapa riset diplomasi publik masih meletakkan negara sebagai aktor yang utama dalam

mengontrol bagaimana sebuah diplomasi publik berjalan. Hal ini terjadi karena isu keamanan mendominasi tujuan diplomasi publik (Signitzer dan Coombs, 1992; Peterson, 2002).

Sejalan dengan tujuannya untuk meraih kepentingan nasional, tradisi liberal yang banyak memberikan pengaruh pada Rasionalisme, menekankan pentingnya dialog sebagai strategi utama dalam diplomasi publik. Adalah pengaruh besar liberalisme yang menempatkan diplomasi sebagai upaya negara dalam mewujudkan perdamaian melalui kompromi tanpa mempedulikan ideologi dan kepercayaan yang dianut oleh setiap negara (Nau, 2009: 42). Diplomasi dibangun untuk mendukung upaya-upaya negara dalam membentuk masyarakat dan tata internasional melalui dialog. Negara berdaulat diasumsikan memiliki akses yang sama di dalam mengomunikasikan kepentingan nasional mereka masing-masing dan tata internasional dibangun demi memenuhi kepentingan nasional tersebut. Semua pandangan masing-masing negara dihargai karena diplomasi dilandasi oleh toleransi dan persamaan. Tanpa menyingkirkan sama sekali strategi monolog dalam diplomasi publik, dialog dipercaya dapat menjadi jembatan berbagai kepentingan yang ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan, saling ketergantungan dan kerjasama. Kepentingan setiap negara dapat dijembatani melalui pembicaraan meskipun masing-masing negara memiliki perbedaan, seperti sistem politik. Diplomasi dapat menjadi jalan untuk mempertukarkan kepentingan negara satu dengan yang lainnya (Nau, 2009: 42). Ide semacam ini mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial dalam diplomasi publik. Setiap kementerian luar negeri bahkan duta besar dan para diplomat diwajibkan untuk memiliki website atau mempergunakan media sosial seperti twitter dan facebook guna menjalin dialog dengan berbagai aktor baik individu, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

KONSTRUKTIVISME DALAM DIPLOMASI PUBLIK

Konstruktivisme lahir sebagai penengah perdebatan

ketiga dalam ilmu Hubungan Internasional.

Konstruktivis muncul di akhir tahun 80an sebagai penengah untuk meredakan perdebatan ini. Konstruktivisme hadir dengan ketertarikan utamanya pada bagaimana obyek dan praktik kehidupan sosial dikonstruksi dan terutama obyek dan praktik yang dianggap oleh peneliti dan masyarakat sebagai hal yang alamiah (*given*). Bagi konstruktivis politik internasional adalah hasil dari konstruksi sosial atau proses interaksi dari agen dan struktur, dimana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam sosial politik (Hadiwinata dalam Hermawan, 2007: 20).

Keberatan Konstruktivis terhadap Positivis meliputi, pertama: konstruktivisme menolak asumsi kaum positivis yang tidak memandang penting agen di dalam realitas politik. Positivis dianggap terlalu menekankan perilaku/kepentingan dan menyingkirkan identitas. Sebaliknya bagi konstruktivis, percaya bahwa keduanya saling terkait dengan erat. Kedua, Konstruktivis menolak logika konsekuensi (*logic of consequences*) dan menekankan logika kepantasan (*logic of appropriateness*). Konstruktivis meyakini bahwa pilihan tindakan aktor tidak selalu didasarkan atas logika konsekuensi yang menekankan perhitungan matematis atas kepentingan yang bersifat materi. Pertimbangan kepantasan dalam mengambil keputusan untuk bertindak merupakan pengaruh utama terhadap aktor. Hal-hal yang bersifat non material atau ideasional dan norma yang saling dibagi dalam pergaulan internasional menjadi landasan bagi tindakan aktor. Ketiga, Konstruktivis menolak pembentukan klaim pengetahuan sebagai hukum obyektif yang dipergunakan untuk kebutuhan melakukan prediksi. Bagi konstruktivis, klaim terhadap pengetahuan hanya dapat dilakukan secara spesifik dan tidak semata-mata mengabdikan kepada kepentingan untuk dapat melakukan prediksi.

Merujuk pada asumsi dasar tersebut maka, bukan kepentingan nasional yang menjadi tujuan diplomasi publik melainkan kesadaran atas adanya perbedanaan identitas negara bagi dasar pembangunan hubungan antar negara. Kesadaran dan pemahaman merupakan

faktor penting yang terkait dengan kedirian seseorang dan hubungan seseorang dengan orang lain, dan komunikasi memiliki peran utama dalam hal ini (Steans dan Pettiford, 2009: 229). Komunikasi telah mengubah paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi dimana apa yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi melainkan proses belajar. Komunikasi dalam hal ini tidak hanya usaha untuk mempertukarkan pesan atau informasi (Bolton, 2005), melainkan merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap entitas politik baik negara maupun subsistem di dalam negara untuk mempertahankan identitas kolektifnya/negaranya (Luhmann, 1995).

Pentingnya dialog terbuka pada level yang lebih luas yaitu antar negara perlu dan dapat dilakukan demi menjamin tetap terselenggaranya perdamaian. Kesadaran dan kesepahaman melalui tindakan komunikatif Habermas dapat dilakukan antar negara melalui apa yang disebut dengan *multilateral diplomacy* (Mitzen, 2005). Bagi Mitzen, wadah bagi dialog antar negara dimungkinkan dalam kondisi yang sejajar dimana setiap peserta selalu akan berusaha membuat diri mereka sendiri mampu didengar oleh peserta yang lain melalui argumentasi yang dapat diterima oleh yang lain. Selain itu, interaksi yang terjadi juga akan menuntun pada norma yang lambat laun diterima sebagai norma bersama. Ide untuk menumbuhkan kesadaran publik semacam ini juga menjadi pijakan bagi Zaharna (Zaharna, 2000) dalam *cultural diplomacy*-nya. Dalam *Cultural Diplomacy* terdapat pengakuan terhadap nilai tertentu yang mempengaruhi setiap aktor non negara dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, publik menjadi penting dalam *cultural diplomacy* karena setiap individu dan kelompok yang sedang membangun *circular intercation* ini akan bertukar nilai secara langsung maupun tidak langsung. Bagi RS Zaharna, kultur adalah faktor penting dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal, non verbal dan pembentukan persepsi. Kultur menyediakan makna bagi berbagai bentuk perilaku komunikasi seperti kalimat atau tanda yang tidak diucapkan, demikian juga aturan dan norma yang melandasi perilaku.

Kultur mempengaruhi persepsi dan menyediakan tanda bagaimana pesan terstruktur dan diinterpretasi.

Tujuan dari diplomasi publik bagi Konstruktivis dengan demikian tidak terletak pada kepentingan nasional semata karena ia percaya kepentingan nasional akan selalu dapat berubah sejalan dengan berubahnya identitas negara yang terjadi karena interaksi antar negara. Diplomasi publik kemudian lebih dipahami sebagai interaksi aktor dalam menyampaikan pesan kepada aktor yang lain dan atau membentuk makna tertentu dalam benak mereka. Diplomasi publik juga dipahami sebagai upaya untuk mempengaruhi norma internasional melalui wacana publik (Juyan, 2006), menumbuhkan kesadaran publik dan akhirnya pembangunan hubungan baik antar negara. Melalui pendekatan semacam ini, diplomasi publik tidak lagi sebatas menyoal *state branding* yang dikehendaki secara sepihak oleh elit. Diplomasi publik bukan lagi sebatas upaya-upaya meyakinkan publik negara lain atas satu citra tertentu melainkan upaya setiap agen dalam mempengaruhi relasi antar negara. Jika kesadaran berbangsa dan identitas nasional tersemat dengan kuat maka diplomasi publik akan menjadi sebuah relasi positif dalam menjamin keseluruhan dinamika hubungan antar negara. Namun sebaliknya jika kesadaran berbangsa lemah dan identitas nasional kabur, maka diplomasi publik akan menjadi sebuah relasi negatif dalam mengelola persoalan antar negara.

Merujuk pada hal tersebut, diplomasi publik Indonesia justru segera terlihat pasca kemerdekaan dimana jati diri bangsa yang baru menjadi pendorong utama baik negara maupun publik domestik mempengaruhi relasi demi memperoleh pengakuan atas identitas diri sebagai bangsa yang merdeka. Bukan lagi sebagai bagian dari Hindia-Belanda melainkan Indonesia dengan sejarah dan nilai budaya sendiri serta menjadi bagian dari pergaulan internasional. Hal tersebut dapat ditemukan dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari Mesir dan beberapa negara Arab yang lain yang tidak hanya dilakukan oleh negara melalui utusannya, Kyai Haji Agussalim. Fachir justru menengarai, diplomasi tersebut diinisiasi dan lebih banyak

dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Indonesia di Mesir. Utusan resmi pemerintah tidak mudah dilakukan kala itu mengingat kondisi Indonesia yang disibukkan oleh perjuangan melawan Belanda yang berupaya menguasai kembali Indonesia melalui kekuatan militer (Fachir, 2009: 24-25). Nama Indonesia dipakai setelah kemerdekaan sebagai nama perkumpulan pemuda dan mahasiswa Indonesia di Mesir, Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia (PKI). PKI memiliki misi untuk menciptakan kebebasan de facto warga Indonesia dari perwalian Belanda dan mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi Indonesia yang merdeka. Mereka melakukan pendekatan khusus kepada tokoh-tokoh politik Mesir dan pendekatan terhadap media massa agar gencar memberitakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Mesir memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto (Rahman, 2007: 156).

Isu intermestik yang muncul antara Indonesia dan Malaysia sekitar tahun 2004-2014 juga menunjukkan sejumlah upaya untuk mempengaruhi hubungan dalam rangka memelihara identitas budaya dan identitas fisik. Meski dikomunikasikan melalui tindakan yang berbeda-beda oleh sekelompok dimensi domestik, upaya tersebut hadir sebagai respon dari isu klaim budaya dan perbatasan antara Indonesia Malaysia. Sebagian dimensi domestik menyelenggarakan upaya kooperatif melalui dialog akademis dan budaya (Eminent Person Group tahun 2008 didirikan sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan intermestik Indonesia Malaysia, Balai Melayu didirikan oleh Mahyudin Almudra sebagai upaya untuk memelihara budaya Melayu dan menjadi jembatan bagi hubungan informal warga kedua negara). Sebagian lain menyelenggarakan hubungan melalui cara-cara praktis yang cenderung negatif seperti demonstrasi anarkis.

Dominasi negara juga ditentang oleh Konstruktivis bukan hanya karena kesadaran warga menjadi hal yang penting dalam memberi mereka jalan dalam relasi antar warga tetapi juga aktor domestik non negara memiliki akses yang semakin besar sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Rondfeldt dan Arquilla, 2009). Bahkan arus

informasi yang semakin terbuka tersebut telah mengaburkan isu domestik dan isu internasional (Vickers, 2004) dimana hal tersebut semakin mendekatkan publik domestik dengan isu-isu antar negara. Mengaburnya aktifitas informasi internasional dan domestik tersebut, mendorong Nye melihat bahwa publik di dalam negara kemudian menjadi bagian yang sama pentingnya dengan publik di luar negara (Nye, 2010). Penting bagi negara untuk menjalin kerjasama dengan aktor domestik (Gregory, 2008; Peterson, 2002) karena banyak manfaat yang didapatkan negara dalam kerjasama tersebut (Huijgh, 2011; Fitzpatrick, 2010).

Memang tidak semua dimensi domestik memiliki pengaruh yang penting dalam postur diplomasi publik. Dimensi domestik yang dimaksudkan memiliki pengaruh pada diplomasi publik adalah masyarakat/publik domestik atau masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat/institusi non profit serta media (Chitty, 2007). Aktor domestik tersebut ditengarai memiliki kepentingan langsung dengan perubahan kebijakan luar negeri selain memiliki akses yang luas terhadap informasi. Dengan demikian, meskipun tidak dapat mempengaruhi keputusan secara langsung atas isu internasional, namun aktor non negara memiliki pengaruh penting yaitu pertama dalam hal *legitimacy* dan *efficacy* dalam citra nasional sebagai *good governance*. *Non state actor* dapat dikatakan *legitimate* dan memiliki *efficacy* ketika mereka mampu mendapat dukungan publik dan mampu meraih apa yang menjadi tujuan mereka. Kedua, penting bagi aktor non negara untuk mendapat dukungan dari publik karena dukungan publik menunjukkan pengakuan publik atas keberadaan mereka. Ketiga, transparansi, akses terhadap dokumen yang dimiliki dan informasi atas dialog-dialog yang dilakukan menjadi sangat penting bagi publik untuk memberikan dukungan (Porte, 2012:3).

Besarnya pengaruh dimensi domestik dalam memelihara identitas nasional sekaligus relasi antar negara tercermin dalam sejumlah kegiatan misi budaya Indonesia dan pertukaran pelajar yang diselenggarakan negara. Sejumlah misi budaya dari tahun 1957-1960an

merupakan diplomasi budaya Soekarno untuk menancapkan identitas nasional Indonesia di sejumlah negara sahabat seperti Pakistan, Uni Soviet, Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang dan lain sebagainya (Lindsay dan Liem, 2011: 227-228). Demikian pula dengan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) di tahun 1963 (Kurniawan dan Alrianingrum, 2013: 191). Sementara KIAS (Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat) pada tahun 1990-1991, merupakan misi Soeharto kala itu untuk memperkenalkan Indonesia melalui budaya (Warsito dan Kartikasari, 2007:150). Setelah didirikannya Direktorat Diplomasi Publik, kegiatan tersebut diberi label sebagai *domestic outreach* (Sukma, 2011; Nabbs-Keller, 2013; Huijgh, 2013).

Tidak semua misi budaya diinisiasi oleh negara, apa yang dikerjakan oleh AlMudra dengan mendirikan Balai Melayu, Tenas Effendi yang melakukan kajian dan pemeliharaan budaya Melayu di Riau, kerjasama kebahasaan melalui MABBIM (Majelis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia) serta sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) yang tersebar di sejumlah negara merupakan bagian dari upaya untuk memelihara identitas nasional. Pengenalan identitas nasional melalui budaya yang memiliki nilai dan karya yang berbeda diyakini justru dapat menumbuhkan saling kesepahaman antar bangsa. Aktifitas untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan negara oleh dimensi domestik secara independen seperti ini disebut Mueller sebagai *spontaneous diplomacy* (Mueller dan Rebstock, 2012). Pengaruh globalisasi telah merubah bentuk peranan publik di dalam diplomasi publik terutama dengan munculnya masyarakat sipil dalam isu antar negara (Melissen, 2011; Porte, 2012; Huijgh, 2013; Trunkos, 2011). Kajian mengenai peran aktor domestik menjadi wilayah yang masih sangat mungkin untuk dikaji lebih lanjut dan konstruktivis memberikan jalan untuk hal tersebut.

Konstruktivis memang tidak secara spesifik menunjukkan strategi dalam diplomasi publik. Namun demikian, tujuan untuk memelihara identitas

nasional dan juga saling kesepahaman atas perbedaan antar negara, merujuk pada pola-pola komunikasi yang efektif. Dialog telah menjadi acuan utama dalam kelompok rasionalis dengan argumen bahwa dialog mampu menumbuhkan rasa percaya antar kelompok. Tulisan Geoffrey Cowen dan Amelia Arselnaut menunjukkan bahwa model komunikasi dialog memiliki efek yang jauh lebih baik dibanding monolog, meski monolog memiliki fungsinya tersendiri yang masih juga diperlukan dalam menyampaikan sebuah ide atau pesan kepada pihak lain. Dialog menurut Cowen dan Arselnaut mampu menumbuhkan hubungan yang lebih baik karena setiap pihak yang terlibat merasa diterima dan terlibat atau menjadi bagian yang penting dari komunitas tersebut (Cowan dan Arsenault, 2008). Riset mengenai diplomasi publik berkembang tidak hanya pada bagaimana negara dapat saling mengirimkan pesan dan berdialog melalui forum formal dan informal tetapi juga bagaimana dapat menjangkau publik di luar negara dengan lebih baik. Pengaruh teknologi menjadi salah satu sumbangan utama bagi revolusi diplomasi publik. Hal ini dicatat oleh Peter Van Ham bahwa diplomasi publik merupakan alat *postmodern* milik negara yang berusaha menggapai kembali legitimasi dan pengakuan di tengah dunia global yang kehilangan monopolinya dalam proses informasi (Ham, 2005: 57).

Bergesernya tujuan diplomasi publik lebih pada kesadaran pemikiran dan atau mempengaruhi ide maupun norma internasional yang mendorong dipergunakannya metode-metode komunikasi dan interaksi yang lebih beragam. Media televisi dan surat kabar merupakan salah satu metode diplomasi publik yang diyakini dapat menjangkau dan mempengaruhi publik secara lebih luas (Entman, 2003; Gilboa, 2002; Ammon, 2001). Meski demikian, ada pula yang meletakkan kontak langsung antar warga negara merupakan upaya yang cukup penting dalam *relationship building* (Leonard, Stead dan Sweming, 2002; Zaharna dalam Snow, 2009). Dengan begitu, diplomasi publik tidak lagi dilakukan dengan cara-cara komunikasi satu arah, melainkan dengan komunikasi dua arah untuk saling bertukar pesan melalui dialog.

Meski media sosial memberikan peluang besar, namun interaksi langsung masih merupakan strategi yang lebih manjur dalam menumbuhkan saling pengertian dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Pada banyak kajian yang didominasi oleh pendekatan rasionalis, tujuan diplomasi publik masih diabdikan bagi kepentingan nasional. Diplomasi publik dipahami sebagai sebuah *image building* melalui *branding* dimana membentuk dan melekatkan *branding* adalah tugas negara. Studi yang meletakkan tujuan diplomasi publik pada hubungan atau relasi antar negara masih sangat terbatas. Hal ini kemudian berpengaruh pada penempatan aktor non negara di dalam diplomasi publik. Hubungan antara negara dan aktor non negara dalam hal ini bersifat subordinan dimana dimensi domestik menjadi aktor yang bersifat pasif. Perannya terbatas untuk mendukung segala kegiatan yang dibuat oleh negara merujuk pada interpretasi negara terhadap politik internasional. Negara menjadi satu-satunya pihak yang menginterpretasikan politik internasional dan atau isu yang terjadi antar negara. Hal inilah yang dikritik oleh Huijgh bahwa, dimensi domestik atau *domestic outreach* sebagai sebuah *denial hurt* karena meski disertakan dalam kegiatan diplomasi publik tetapi sama sekali tidak diberi tempat dalam konsepsi diplomasi publik (Huijgh, 2013).

Pendekatan semacam ini ternyata tidak dapat sepenuhnya menjelaskan hubungan antar negara yang saat ini lebih banyak didominasi oleh warga antar negara baik kontak langsung, media cetak dan elektronik. Mengaburnya batasan negara juga telah membawa isu internasional dan domestik menjadi isu-isu intermestik yang tidak mudah lagi dipilah. Memahami diplomasi publik dalam bingkai Konstruktivis memberikan peluang untuk memahami hubungan antar negara dari sisi lain. Sisi dimana hubungan antar negara bukan soal bagaimana negara secara formal membangun hubungan melainkan bagaimana hubungan antar negara sebagai keseluruhan dibangun oleh berbagai agen baik negara maupun

aktor domestik non negara. Beranjak dari kesadaran dan identitas berbangsa yang melekat, diplomasi publik mengantarkan rangkaian pemahaman mengenai hubungan antar negara yang tidak lagi didominasi negara.

Kontribusi lain yang ditawarkan pendekatan ini adalah bahwa aktor domestik non negara yang diasumsikan memiliki akses yang sama dalam menginterpretasi dan merespon fenomena intermestik (Stone, 2011; Chandra, 2004; Tan, 2005) dapat menjadi partner sejajar negara dalam menginterpretasi dan merespon fenomena intermestik. Menempatkan mereka secara subordinan dalam diplomasi publik merupakan hal yang kurang tepat. Sebagai agen, dimensi domestik dapat menjadi salah satu dari sekian ujung tombak diplomasi publik dalam mempengaruhi hubungan antar negara, baik secara independen atau subordinan. Klaim atas konstruksi kesadaran berbangsa menjadi dasar dari keseluruhan argumentasi pendekatan Konstruktivis di dalam kajian diplomasi publik Indonesia. Meski demikian, dalam hal strategi pendekatan ini tidak terlalu memberikan wacana baru untuk dikembangkan.

REFERENSI

- Abd. Rahman, Suranta. 2007. *Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947*. Wacana, Vol. 9; No. 2, Oktober 2007.
- Ammon, Royce. 2001. *Global Television and the Shaping of World Politics: CNN, Telediplomacy and Foreign Policy*. McFarland: Jefferson NC.
- Berridge, GR.. 2010. *Diplomacy Theory and Practice* (4th ed.). Plagrave Macmillan: Hampshire.
- Bolton, Roger. 2005. *Habermas's Theory of Communicative Action and the Theory of Social Capital*. Paper read at meeting of Association of American Geographers. Colorado. April 2005.
- Brown, John. 2012. *Public Diplomacy and Propaganda: Their Differences*. (Online), (http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2008/0709/comm/brown_pudiplprop.html, diunduh tanggal 30 Agustus 2014).
- Chandra, Alexander C.. 2004. *Indonesia's Non State Actors in ASEAN: A New Regionalisme Agenda for Southeast Asia?*. Contemporary Southeast Asia, Vol. 26, No. 1, April 2004.
- Chitty, Naren. 2007. *Diplomacy Public*. Paper Submission to the Senate Affairs, Defence and Trade Commission. Inquiry into the nature and conduct of Australian's public diplomacy.
- Chitty, Naren. Tanpa Tahun. *Public Diplomacy: Courting Publics Fors Short Term Advantage or Partering Publics for Lasting Peace and Sustainable Prosperity?*. (Online), (<http://www.wandrenpd.com/wp->

- content/uploads/2010/10/9789004179400_FisherLucas_15-chapter_Chitty_proof-01_enabled.pdf, diunduh 20 April 2014).
- Cowan, Geoffrey dan Amelia Arsenault. 2008. *Moving from Monolog to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616. Sage Publications.
- Devlen, Balkan et. al.. 2005. *The English School, International School: International Relations and Progress*. *Journal of International Studies Issues* 7. Malden: Blackwell Publishing.
- Effendy, Tonny Dian. 2013. *Diplomasi Publik sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 9 No. 1 (online). (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalllmiahHubunganInternasiona/article/view/540/524>, diunduh tanggal 10 November 2014).
- Entman, Robert M.. 2003. *Cascading Activation: Contesting the White House's Frame after 9/11*. Political Communication.
- Fachir. A.M.. 2009. *Potret Hubungan Indonesia-Mesir*. Kairo: KBRI Cairo.
- Fitzpatrick, Kathy R.. 2010. *US Public Diplomacy's Neglected Domestic Mandate*. CPD Perspective on Public Diplomacy, Paper 3, 2010. Los Angeles: Figueroa Press.
- Gabriela, Clarisa. 2013. *Peran Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Pencapaian Kepentingan Nasionalnya*. (Online), (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6316/skripsi%20HI%20clarissa%20gabrella.pdf?sequence=1>, diunduh tanggal 10 November 2014).
- Gilboa, Eytan. 2002. *The Global News Networks and US Policymaking in Defense and Foreign Affairs*. The Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy. Kennedy School of Government: Cambridge.
- Gregory, Bruce. 2008. *Public Diplomacy: Sunrise of the Academic Field*. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616. Sage Publications.
- Hadi, Umar. 2009. *Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional*. *Tabloid Diplomasi* (Online). (<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/55-desember-2007/535-diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html>, diunduh tanggal 10 Desember 2014).
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Hubungan Internasional: Dari Realism hingga Konstruktivisme*. Dalam Yulius P. Hermawan. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ham, Peter Van. 2010. *Social Power in International Politics*. New York: Routledge.
- Ham, Peter Van. 2005. *Power, Public Diplomacy and the Pax Americana*. Dalam Jan Melissen. *The New Public Diplomacy, Soft Power in International Relation*. New York: Palgrave McMillan.
- Hoffman, Bruce. 2002. *Rethinking Terrorism dan Counterterrorism Since 9/11*. Studies in Conflict and Terrorism. Taylor Francis.
- Huijgh, Ellen. 2012. *Public Diplomacy in Flux: Introducing the Domestic Dimension*. *eHague Journal of Diplomacy* 7 (2012), hal. 359-367.
- Huijgh, Ellen. 2011. *Changing Tunes for Public Diplomacy: Exploring the Domestic Dimension*. Netherlands Institute of International Relations (online). (http://www.exchangediplomacy.com/wp-content/uploads/2011/10/6.-Ellen-Huijgh_Changing-Tunes-for-Public-Diplomacy-Exploring-the-Domestic-Dimension.pdf, download 20 April 2014).
- Issundari, Sri dan Iva Rachmawati. 2015. *Increasing Indonesian Public Diplomacy Through IACS (Indonesian Art and Culture Scholarship) Program*. Social Coservation based on Nation Character Building. International Conference on Education and Social Sciences 4th ICESS.
- Nye, Joseph. 2010. *The Essential New Public Diplomacy in Modern Power Politics*. (Online), (<http://bataviase.co.id>, diunduh tanggal 10 Desember 2012).
- Juyan, Zhang. 2006. *PD as Symbolic Interactions: A Case Study of Asian Tsunami Relief Campaigns*. *Public Relation Review* No. 32.
- Kurniawan, Bayu dan Septina Alrianingrum. 2013. *Ganefo sebagai Wahana dalam Mewujudkan Konsepsi Politik Luar Negeri Soekarno 1963-1967*. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No 2, Mei 2013*
- La Porte, Teresa. 2012. *The Legitimasi and Effectiveness of Non-State Actors and the Public Diplomacy Concept*. Public Diplomacy Theory and Conceptual Issues. ISA Annual Covention, San Diego, April 1-4, 2012.
- Leonard, Mark. 2002. *Public Diplomacy*. The Foreign Policy Centre. London: The Mezzanine Elizabeth House.
- Lindsay, Jennifer dan Maya H.T. Liem. 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia. 1950-1965*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Linklater, Andrew. 1996. *Rationalism*. Scott Burchill dan Andrew Linklater (ed). *Theories of International Relations*. London: MacMillan Press LTD.
- Luhmann, Niklas. 1995. *Social System*. California: Stanford University Press.
- Nabbs-Keller, Gretta. 2013. *Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership*. Contemporary Southeast Asia, Vol. 35, No. 1.
- Nakamura, Kennon H. dan Matthew C. Weed. 2009. *U.S. Public Diplomacy: Background and Current Issues*. Congressional Research Service CRS Report for Congress. 7-5700. (www.crs.gov diunduh tanggal 12 Juni 2013).
- Nau, Henry. 2009. *Perspective on International Relations, Power, Institution, Ideas 2nd*. Washington: CQ Press.
- Nsson, Christer J. 2013. *Diplomasi, Tawar Menawar dan Negosiasi*. Dalam Walter Carlsnaess et. al.. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Ma'mun, A. Saefudin. 2009. *Citra Indonesia di Mata Dunia Gerakan Kebasan Informasi dan Diplomasi Publik*. Bandung: TrueNorth.
- Melissen, Jan. 2011. *Beyond the New Public Diplomacy*. *Clingendael Paper*, No. 3. The Hague Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael': Netherland.
- Melissen, Jan. 2005. *The New Public Diplomacy Soft Power in International Relation*. London: Palgrave.
- Mitzen, Jennifer. 2005. *Reading Habermas in Anarchy: Multilateral Diplomacy and Global Public Spheres*. *The American Political Science Review*, Vol. 99, No. 3. August 2005.
- Madu, Ludiro 2008. *Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoritis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet*. *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari - Juni 2008.
- Mueller, Sherry Lee dan Mark Rebstock. 2012. *The Impact and Practice of Citizen Diplomacy*. *PD Magazines Issue 7 Winter 2012*. USC

- Annenberg Press.
- Peterson, Peter G.. 2002. *Public Diplomacy and the War on Terrorism*. Foreign Affairs, Vol. 81. No. 5, September-Oktober 2002.
- Rasmussen, Ivan Willis. 2011. *Towards A Theory of Public Diplomacy, A Quantitative Study of Public Diplomacy and Soft Power*.
- Rondfeldt, David dan John Arquilla. 2009. *Noopolitik: A New Paradigm for Public Diplomacy*. Dalam Nancy Snow. Routledge Handbook of Public Diplomacy. Routledge: New York.
- Sari, Fitri Dyah Ruslina Novika. 2013. *Strategi Diplomasi Publik dalam Meningkatkan Citra Seni Budaya Indonesia di Mata Dunia Internasional (Studi Kasus: Seni Tari Dayak Kalimantan Timur)*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013. 1 (4). (ejournal.hi.fisip.unmul.org diunduh tanggal 10 November 2014).
- Singer, Peter Warren. 2006. *America, Islam and the 9-11 War*. Current History. December 2006.
- Signitzer, Benno dan Timothy Coombs. 1992. *Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Divergence*. Public Relation Review 18.
- Snow, Crocker, Jr.. 2008. *Murrow in the Public Interest: from Press Affairs to Public Diplomacy*. (<http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2008/06/20080601113033eaifas0.5135767.html#ixzz3G2mL8WSd>, diunduh tanggal 30 Agustus 2014).
- Steans, Jill dan Ilyod Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stone, Diane. 2011. *The ASEAN-ISIS Network: Intepretive Communities, Informal Diplomacy and Discourse of Region*. (Online), (<http://go.warwick.ac.uk/wrap>, diunduh tanggal 20 April 2014).
- Tan, See Seng. 2005. *Non Official Diplomacy in Southeast Asia: "Civil Society" or Civil Service?*. Contemporary Southeast Asia, Vol 27. No 3. December 2005.
- The 9/11 Commission Report*. 2001. (Online), (<http://www.911commission.gov/report/911report.pdf>, diunduh tanggal 10 Desember 2014).
- Public Diplomacy Association. *What is Public Diplomacy?*. (online), (<http://www.publicdiplomacy.org>, diunduh tanggal 10 Juli 2012).
- _____. 2011. *FBR Akan Sweeping Warga Malaysia*. (Online), (<http://news.okezone.com/read/2011/10/15/338/515572/fbr-akan-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2011. *Demo Kedubes Malaysia*. (Online), (<http://fbr-korwil-tangerang.blogspot.co.id/2011/10/demo-kedubes-malaysia.html>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2010. *Aktis Bendera Sweeping Warga Malaysia*. (Online), (<http://news.liputan6.com/read/294600/aktis-bendera-sweeping-warga-malaysia>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2009. *Warga Malaysia Di-Sweeping di Jalan Diponegoro*. (Online), (<http://news.detik.com/berita/1199055/warga-malaysia-di-sweeping-di-jalan-diponegoro> diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2011. *FBR Akan Sweeping Warga Malaysia*. (<http://news.okezone.com/read/2011/10/15/338/515572/fbr-akan-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2011. *Demo Kedubes Malaysia*. (Online), (<http://fbr-korwil-tangerang.blogspot.co.id/2011/10/demo-kedubes-malaysia.html>, diunduh tanggal 24 Oktober 2015).
- _____. 2010. *Aktis Bendera Sweeping Warga Malaysia*. (<http://news.liputan6.com/read/294600/aktis-bendera-sweeping-warga-malaysia>, diunduh tanggal 25 Oktober 2015).
- _____. 2009. *Warga Malaysia Di-Sweeping di Jalan Diponegoro*. (Online), (<http://news.detik.com/berita/1199055/warga-malaysia-di-sweeping-di-jalan-diponegoro>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2015) dan netwar (Ludiro Madu, 2008).
- Trunkos, Judit. 2011. *Changing Diplomacy Demands New Type of Diplomats*. Institute of Cultural Diplomacy's International Conference. The Future of US Foreign Policy and "The Revival of Soft Power and Cultural Diplomacy?". January 4-6, 2011 Washington DC.
- Tuch, Hans. 1990. *Communicating with the Worlds: US Public Diplomacy Overseas*. New York: St. Martin.
- Vickers, Rhiannon. 2004. *The New Public Diplomacy: Britain and Canada Compared*. Political Studies Association. Garsington Road: Blackwell Publishing.
- Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari. 2007. *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wirajuda, Hassan. 2007. *Membangun Citra Indonesia Demokratis, Moderat and Progresif: Konsolidasi Soft Power dan Aset Politik Luar Negeri RI*. Disampaikan dalam Pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda pada *Lokakarya Nasional Diplomasi Publik*, 11 Desember 2007, (<http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=speech&id=111>)
- Zaharna, RS. 2009. *Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives*. Dalam Nancy Snow. *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge: New York.
- Zaharna, RS. 2000. *Intercultural Communication and International Public Relation: Exploring Pararells*. Communication Quaterly, Vol. 48. No. 1. Winter.